

**TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN
SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIHUBUNGKAN DENGAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Yelma Nomida Alvisalia

1487073

ABSTRAK

Mineral dan batubara sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga dikuasai oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan negara dalam lingkup perusahaan dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia salah satunya dengan adanya IUP. IUP berfungsi untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Pemegang IUP bukanlah pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah tidak otomatis menjadi pemegang IUP. Tanah yang dikuasai pemegang IUP tidak serta merta dapat langsung dimanfaatkan. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan bertahap dan berjangka waktu cukup lama. Akibatnya, timbul kesan penelantaran tanah dan mengundang pihak lain untuk melakukan penyerobotan tanah. Salah satunya menggunakan Surat Keterangan Tanah. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah dalam hal penguasaan hak atas tanah. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang IUP akibat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah. Ketiga, untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan sumber daya mineral dan batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akibat diterbitkan Surat Keterangan Tanah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, berdasarkan referensi kepustakaan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis berdasarkan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, buku, jurnal, bahan seminar, doktrin, dan lain-lain. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah hanya sekedar surat keterangan penguasaan fisik atas tanah khususnya dalam WIUP, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah sebagai alat bukti penguasaan hak atas tanah. Berbeda halnya apabila pemilikan tanah menggunakan sertipikat. IUP yang diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha tambang merupakan bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah untuk penguasaan tanah dalam WIUP tidak dapat menyimpangi IUP yang sudah ada terlebih dahulu. Surat Keterangan Tanah memang dimungkinkan untuk menguasai permukaan tanah, tapi tidak untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara dalam perut bumi.

Kata Kunci: Surat Keterangan Tanah, Penguasaan Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan.

**JURIDICAL REVIEW OF LAND RIGHTS MASTERING BASED ON LAND
LETTER (SKT) CONNECTED WITH MINING BUSINESS LICENSES (IUP)
BASED ON LAWNUMBER 4 YEAR 2009 REGARDING MINERAL AND COAL
MINING**

Yelma Nomida Alvisalia

1487073

ABSTRACT

Minerals and coal as one of Indonesia's natural resources is used for the greatest prosperity of the people, so that it is controlled by the state. Based on Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining, state control within the scope of the business can be delegated to other parties within the territory of mining law of Indonesia one of them is with the existence of IUP. IUP serves to carry out mining business activities. IUP owners are not the owners of land rights and the owners of land rights do not automatically become owners of IUP. Land held by IUP owners can not be directly utilized. Mining business activities carried out gradually and timed long enough. As a result, an impression of neglect of the land and invite other parties to make land grabs. One of them uses Land Letter. The purpose of this study, the first is to know the legal power of Land Letter in terms of land rights mastering. Second, is to know the legal protection for IUP owners due to the issuance of Land Letter. Third, is to know the legal certainty of ownership of mineral and coal resources in Mining Permit Areas (WIUP) due to issued Land Letter.

This study uses a type of normative juridical research, based on literature references. The nature of the study used descriptive analytical based on secondary data from primary and secondary legal materials. The primary legal material consists of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining, Law Number 5 Year 1960 regarding Basic Regulations of Agrarian Principles, Government Regulation Number 23 Year 2010 regarding Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration, and others. Secondary law materials such as draft laws, books, journals, seminar materials, doctrines, and others. Tertiary legal material consists of legal dictionaries, encyclopedias, and others. The preparation of this research using the statute approach and conceptual approach. Data collection techniques were obtained from the literature study. Data analysis method used is qualitative research with deductive mindset.

The results showed that the Land Letter is just a letter of physical land rights mastering, especially in WIUP, so it has a weak legal force as a proof of land rights mastering. Unlike the case when land ownership using certificates. IUP granted by the government to mining entrepreneurs is a form of legal protection in the implementation of mineral and coal mining business activities. The issuance of Land Letter for land rights mastering in WIUP can not diverge the existing IUP first. Land Letter are indeed possible to master the surface of the land, but not to master the mineral resources and coal in the bowels of the earth.

Keywords: Land Letter, Land Rights Mastering, Mining Business Licenses

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Jenis Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Metode Analisis Data.....	22

G. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENGATURAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA.....	25
A. Hukum Pertambangan di Indonesia	25
1. Pengertian Pertambangan dan Hukum Pertambangan	25
2. Objek Kajian Hukum Pertambangan	26
3. Asas-Asas dalam Hukum Pertambangan	26
4. Sejarah Singkat Sumber Hukum Pertambangan	28
B. Pertambangan Mineral dan Batubara	34
1. Penggolongan Bahan Tambang.....	34
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	36
3. Usaha Pertambangan.....	39
C. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	41
1. Perizinan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.....	41
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	45
3. Persyaratan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	51
4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	55
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ..	56
6. Dampak dari Kegiatan Usaha Pertambangan.....	60
BAB III PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP).....	63
A. Hukum Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria.....	63
1. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah.....	65
2. Sejarah Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	65
3. Sumber Hukum Tanah di Indonesia.....	71
4. Asas-Asas dalam Hukum Tanah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)	80
5. Objek Hukum Tanah	84
B. Hak Penguasaan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional	84
1. Hak Penguasaan Atas Tanah.....	84

2. Macam-Macam Hak Penguasaan atas Tanah.....	90
C. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	99
1. Hak Atas Tanah.....	99
2. Peralihan Hak Atas Tanah.....	110
3. Pendaftaran Tanah.....	111
4. Surat Keterangan Tanah.....	116
5. Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia	117
6. Pemakaian Tanah Untuk Pertambangan	119

BAB IV ANALISIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIHUBUNGKAN DENGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....

A. Kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa / Lurah dalam Hal Penguasaan Hak Atas Tanah.....	121
1. Kedudukan Kepala Desa / Lurah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.....	121
2. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa / Lurah.....	126
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Akibat Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Oleh Kepala Desa / Lurah	134
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	134
2. Perlindungan Hukum Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT).....	141
C. Kepastian Hukum Mengenai Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Wilayah Izin Usaha	

Pertambangan (WIUP) dengan Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT).....	158
1. Konsep Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	158
2. Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Akibat Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)	169
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran.....	179
Daftar Pustaka.....	182
Lampiran	
Curriculum Vitae	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor
Wilayah Provinsi Jawa Barat

